

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN  
NAGARI (STUDI DI KENAGARIAN PADANG LAWEH MALALO,  
KABUPATEN TANAH DATAR).**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S1) Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**Yulia Rahmi  
97270/2009**

**PRODI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari (Studi di  
Kenagarian Padang Laweh Malalo)

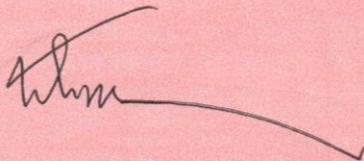
Nama : YULIA RAHMI  
BP/NIM : 2009/97270  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2014

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. H. Helmi Hasan M.,Pd**  
Nip. 19490614 197503 1 002



**Drs. H. Yasril Yunus M.Si**  
Nip.19531017 198211 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

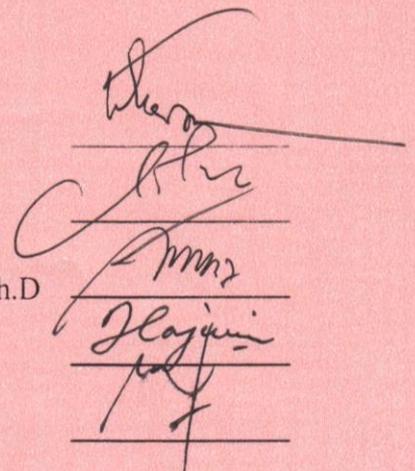
### **Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari (Studi di Kenagarian Padang Laweh Malalo)**

Nama : YULIA RAHMI  
BP/NIM : 2009/97270  
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2014

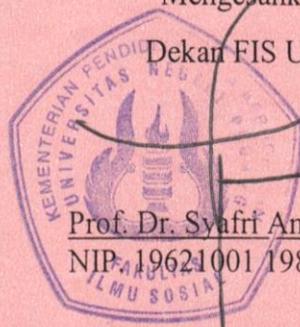
Tim Penguji:

	Nama
Ketua	: Dr. H. Helmi Hasan M.Pd
Sekretaris	: Drs. H. Yasril Yunus M.Si
Anggota	: Afriva Khaidir, SH. M, Hum MAPA. Ph.D
Anggota	: Drs. Karjuni DT. Maani M.Si
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M, Si. Ph.D



Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YULIA RAHMI**  
BP/Nim : 2009/97270  
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari(Studi di Kenagarian Padang Laweh Malalo)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (Skripsi saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah di tulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dandicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ Skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim pembimbing, Tim penguji dan ketua Program studi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang , Januari 2014

Menyatakan



**YULIA RAHMI**

**Nim. 97270/2009**

## ABSTRAK

### **Yulia Rahmi (2009/97270) : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari (Studi di Kenagarian Padang Laweh Malalo)**

Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk melayani masyarakat nagari, baik dalam hal pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari itu sendiri. Latar belakang Penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu karena tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari *Padang Laweh Malalo* kurang efektif pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan nagari dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari tersebut, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari, dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari di Kenagarian Padang Laweh Malalo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari Padang Laweh belum terlaksana dengan baik. Semua itu disebabkan oleh (1) Kurang profesionalnya perangkat nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas. (2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung jalannya pemerintahan nagari serta Ketersediaan dana yang masih jauh dari cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari Padang Laweh Malalo. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintahan nagari Padang Laweh Malalo dalam mengatasi kendala yang ada adalah dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur nagari untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam mengelola sumber keuangan nagari dengan baik, serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memajukan nagari lebih baik kedepannya, dalam hal sarana dan prasarana pendukung itu dilakukan dengan berusaha mengajukan proposal ke pihak Kabupaten untuk pengadaan kantor Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari Padang Laweh Malalo belum terlaksana dengan baik. Untuk disarankan agar dilakukannya pembinaan yang maksimal dan terarah dalam meningkatkan keprofesionalan, keterampilan dan kemampuan perangkat nagari untuk menggali sumber daya yang tersedia di Nagari

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya serta petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diajukan kepada tim penguji skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan kewarganegaraan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tak luput dari lingkupan permasalahan yang cukup banyak, baik dari segi literatur maupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan isi skripsi ini. Alhamdulillah berkat masukan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D. selaku ketua jurusan yang telah memberikan kesempatan dalam menyusun skripsi ini.
2. Ibu Heni Muchtar, SH. M.Hum selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan kesempatan dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Helmi Hasan , M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Yasril Yunus, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum MAPA.Ph.D. selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Karjuni DT. Maani, M.Si selaku dosen penguji III yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Fachri Adnan, M.Si P.hD selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Orang tua yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil serta motivasi.
9. Teman dekat yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Seseorang yang spesial yang selalu memberi dukungan dan motivasi baik di saat suka ataupun suka.
11. Seluruh mahasiswa Universitas Negeri padang terutama Jurusan Ilmu Sosial Politik

Akhirnya penulis menyadari begitu banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini. Atas semua kritik dan saran yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Amin ya rabbal alamin.....

Padang, Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Fokus Penelitian .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Pemerintahan Nagari .....	9
2. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari .....	13
3. Faktor yang mempengaruhi .....	24
B. Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Informan Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Penguji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	38

**BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	41
B. Temuan Khusus .....	49
C. Pembahasan .....	87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Nama-Nama Informan Penelitian .....	32
Tabel IV.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	45
Tabel IV.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan .....	45
Tabel IV.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	45
Tabel IV.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	45
Tabel IV.5 Nama-nama Aparatur pemerintah nagari.....	48
Tabel IV.6 Nama-nama Kepala Jorong Nagari Padang Laweh Malalo.....	48
Tabel IV.7 Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur penyelenggara pemerintahan nagari.....	13
Gambar 2 Kerangka konseptual .....	27
Gambar 3 Gambaran umum Nagari Padang Laweh Malalo .....	41
Gambar 4 Pelaksana tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari.....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi penelitian
- Lampiran 3 Surat izin penelitian

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah menjadi momentum di dalam pengaturan pemerintahan terendah di seluruh Indonesia yang lebih menekankan kepada keanekaragaman masing-masing Daerah. Disebutkan pada pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa di Sumatera Barat terdiri dari pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang akan menyelenggarakan pemerintahan Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Sekretaris Nagari serta Perangkat Nagari lainnya sebagai pelaksana pemerintah Nagari itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 206, Desa atau dengan nama lainnya, dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada Desa dalam urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan Desa itu adalah :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pemerintah Daerah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari. Yang mana dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat ini masing-masing Daerah yang ada di Sumatera Barat diberikan pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah, dalam hal ini adalah Kabupaten Tanah Datar yang ditanggapi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, sebagai suatu pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, setelah diberlakukannya kedua peraturan Daerah tersebut, maka pemerintahan desa dan kelurahan yang ada dikembalikan ke pemerintahan Nagari.

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan batasan bahwa Nagari adalah:

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikatakan sebagai pemerintahan Nagari adalah :

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 pasal 5 bahwa pemerintahan Nagari itu terdiri dari :

1. Wali Nagari selaku pimpinan pemerintah Nagari dan jajarannya.
2. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN ) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
3. Jorong adalah bagian wilayah kerja Nagari dalam pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.

Yang mana para Perangkat Nagari tersebutlah yang akan melaksanakan pemerintahan Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah ditetapkan oleh peraturan diatas, baik dari segi mengelola potensi yang memang sudah ada di Nagari tersebut, membina kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam mewujudkan Nagari yang semakin baik kedepannya, yang ditujukan untuk membangun Nagari serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan tidak terlepas dari apa yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang telah dijabarkan diatas mengenai pemerintahan Nagari.

Namun pada kenyataannya melihat kondisi pemerintah Nagari saat ini, apakah memang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari tersebut terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, khususnya di KeNagarian Padang Laweh Malalo, Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan di keNagarian Padang Laweh Malalo ini merupakan Nagari yang kaya akan sumber daya alam seperti adanya galian pasir, kawasan konservasi ikan Danau Singkarak tetapi masyarakatnya masih banyak yang kemampuan ekonominya lemah, pembangunan Nagari tidak ada, serta kurangnya pemberdayaan masyarakat Nagari, berarti dapat dikatakan bahwa pemerintahan Nagari tidak dapat memanfaatkan dengan baik kekayaan yang ada di wilayah KeNagarian Padang Laweh Malalo, pemerintahan Nagari Padang Laweh Malalo belum menerapkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari itu sendiri.

Sebagai data pendukung adanya pengamatan Penulis dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 15 juni 2013 dengan Barul selaku sekretaris Nagari bahwa ia mengatakan “ Pemerintahan Nagari belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik , para kepala urusan yang tidak dapat melakukan pemberdayaan berupa penyuluhan-penyuluhan yang efektif kepada masyarakat, tidak berjalannya organisasi-organisasi seperti Karang Taruna dan PKK dengan baik, ketua dan anggota BPRN yang mempunyai jabatan ganda, ada yang sebagai guru, petani dan kantor BPRN yang tidak ada serta tidak adanya kontrol yang tepat

terhadap Badan Usaha Nagari, perbaikan jalan akibat longsor yang belum memadai, tidak pekanya pemerintah Nagari terhadap potensi yang dimiliki oleh Nagari tersebut.

Dan juga ada wawancara Penulis dengan tokoh masyarakat yang bernama Kasmir, orang yang diberikan penghargaan kalpataru oleh Bapak Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa “Kurang efektifnya pelayanan di kantor Wali Nagari, tidak tepat sasaran dalam pembagian Beras Raskin, begitu juga dengan BLT ( bantuan langsung tunai) itu disebabkan kurang telitinya Perangkat Nagari dalam mendata siapa yang pantas dan yang tidak pantas mendapatkan bantuan tersebut, serta pembangunan yang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari (Studi di keNagarian Padang Laweh Malalo)* “

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari sebagai berikut :

1. Kurang terlaksananya tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari.
2. Pelayanan dari pemerintahan Nagari yang kurang baik terhadap masyarakat.
3. Adanya jabatan ganda dalam pemerintahan Nagari yaitu anggota BPRN
4. Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang

### **C. Batasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu dibatasi permasalahan yang akan diteliti mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari Padang Laweh Malalo. Kendala yang dihadapi pemerintahan nagrai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari Padang Laweh Malalo.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan Latar belakang dan batasan masalah diatas Penulis akan mengemukakan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari (Studi di keNagarian Padang Laweh Malalo) ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari?

### **E. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari identifikasi, batasan, dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian adalah Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari (Studi di KeNagarian Padang Laweh Malalo).

## **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari (Studi di keNagarian Padang Laweh Malalo).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari.

## **G. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas maka yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Di sisi teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana dalam mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan metodologis Penulis dalam menyusun kajian literatur terutama terkait mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah serta dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penelitian sejenis pada waktu mendatang.
2. Di sisi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari seperti perangkat Nagari agar lebih baik kedepannya, serta memberikan masukan bagi masyarakat Nagari.